



JURNAL KELUARGA BERENCANA

e-ISSN : [2503-3379](#)
p-ISSN : [2527-3132](#)



<http://ejurnal.bkkbn.go.id>

KEBIJAKAN DAN POTENSI DAERAH MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI MENUTUP (TRANSISI DEMOGRAFI LANJUT)

Darojad Nurjono Agung Nugroho¹

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
darojad.n@gmail.com

Diterima 29 Sept 2019; diterima dalam bentuk revisi 17 Desember 2019; diterima 20 Desember 2019
diterbitkan online 26 Desember 2019

Abstrak

Bonus demografi masih di tingkat nasional. Daerah perlu peka terhadap perubahan dinamika kependudukan diwilayahnya bahwa bonus demografi peluang sekali, rentang waktu cukup singkat dan menutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kepekaan pemerintah daerah terhadap bonus demografi dan bagaimana kondisi masyarakat di wilayah yang sedang menghadapi bonus demografi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ditentukan berdasarkan kriteria wilayah yang sedang mengalami bonus demografi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Bali dan selanjutnya diambil 1 kabupaten yang tertinggal dengan indikator IPM rendah. Hasilnya menunjukkan pemerintah daerah kabupaten ada yang belum terpapar pemahaman bonus demografi, sedangkan di tingkat provinsi antar instansi belum mempunyai pemahaman yang sama tentang bonus demografi. Adanya kebijakan pusat dengan daerah yang belum serasi dan sinergis mengoptimalkan bonus demografi. Bonus demografi diiringi meningkatnya usaha mikro dan industri kecil sebagai upaya penciptaan kerja mandiri. Masyarakat belum menyadari adanya bonus demografi dan berharap peran pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan dan keahlian yang dapat diakses secara online.

Kata kunci: Bonus demografi, akses pelatihan, usaha mikro, internet, penciptaan kerja mandiri

I. PENDAHULUAN

Indonesia pada tahun 2030 di perkiran menghadapi peluang bonus demografi atau *windows of opportunity*. Peluang tersebut tercipta hanya sekali dalam masa transisi demografi. Setiap negara akan menghadapi bonus demografi. Potensi bonus demografi bagi negara untuk optimalisasi pembangunan dan kesejahteraan. Bloom, dkk (2003) bonus demografi lebih dikaitkan pentingnya struktur umur terhadap perubahan demografi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur umur suatu negara dapat memiliki efek signifikan pada kinerja

ekonominya. Negara-negara dengan proporsi anak yang tinggi cenderung mencurahkan sumber daya proporsi yang tinggi untuk perawatan mereka, yang cenderung menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan berdaulat. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus penduduknya secara otonom. Setiap daerah diberikan hak dan kebebasan untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Malalui pendekatan demografi, perlunya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk sensitif terhadap isu nasional. Misalnya isu bonus demografi. Noor, M (2015) menyebutkan kebijakan pembangunan kependudukan dan bonus demografi dimana asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu. Lebih lanjut menyebutkan pemangku kebijakan perlunya menyadari pentingnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat men-support pemanfaatan bonus demografi agar potensi-potensi yang dimiliki oleh penduduk umur produktif tersebut optimal dan maksimal. Harapannya adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk umur produktif, terutama kaum muda sebagai 'motor penggerak' bangsa.

Setiap daerah akan memasuki bonus demografi sesuai perubahan struktur umur masing-masih. Ada provinsi yang lebih dulu memasuki bonus demografi sebelum nasional. Meita, dkk (2016) menyatakan Pembangunan perlu didasarkan pada realita kependudukan secara berkelanjutan. Bonus demografi terjadi karena jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Struktur penduduk di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh penduduk umur produktif pada periode 2010-2020. Rimbawan (2014) membahas tentang bonus demografi di Provinsi Bali. Bali diproyeksikan mengalami bonus demografi puncak periode 2020 sampai 2030, dengan dependency ratio antara 42,2 sampai 43,3 persen. Manfaat bonus demografi tidak langsung dapat dirasakan, sehingga diperlukannya kebijakan pemerintah seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan.

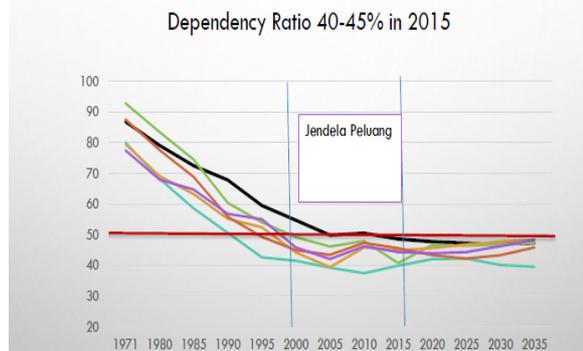
Selain di tingkat provinsi, keberadaan bonus demografi juga sampai di tingkat kabupaten/kota. Zulham, T dan Basyiran, B (2015) menyebutkan Bonus demografi akan terjadi dalam rentang tahun 2010-2020 di kota Banda Aceh. dan tingkat persiapan dalam sektor ketenagakerjaan sejauh ini belum optimal. Ini mengancam Banda Aceh tidak dapat merasakan manfaat dari windows of opportunity ini. Sehingga diperlukan adanya kebijakan dan program pemerintah kota dalam mempersiapkan penduduk usia produktif yang dapat menyongsong tantangan ekonomi daerah di

masa depan, terutama dengan memperkuat sektor ketenagakerjaan dan kualitas pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan *focus group discussion* (FGD). Selain itu, diperlukan data sekunder berupa dokumen perencanaan daerah, buku profil daerah maupun laporan kinerja dinas.

PROPINSI DENGAN TRANSISI DEMOGRAFI LANJUT. (BONUS DEMOGRAFI MENUTUP)



Sumber : Pemaparan Rakornas BKKBN 2018

Lokasi penelitian dipilih wilayah/provinsi yang mempunyai angka ketergantungan umur atau *dependency ratio* antara 40-46 persen. Berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 diperoleh provinsi yang berada di zona tersebut diantaranya Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Bali, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Penelitian ini memilih secara *purposive* 3 provinsi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Bali. Adapun lokus penelitian di tingkat kabupaten dengan kriteria salah satunya mempunyai IPM yang rendah, yaitu Kab. Bolaang Mongondo, Kab. Sampang, dan Kab. Karangasem.

Informan yang diwawancarai diantaranya Bappeda, Dinas pendidikan, Dinas tenaga kerja, dinas koperasi, dinas kesehatan dan Dinas perindustrian serta Dinas OPD KB. Wawancara dilakukan di masing-masing dinas. Tim peneliti dibantu fasilitator provinsi menjadwalkan untuk kunjungan ke masing-masing dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu juga dilakukan wawancara ke mitra perguruan tinggi dalam hal ini pusat studi kependudukan.

Penelitian ini diharapkan memperoleh informasi yang lengkap terkait kondisi daerah dalam menghadapi bonus demografi yang akan menutup. Potensi dan masalah apa yang dihadapi

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan bonus demografi diwilayahnya. Selain itu, dilakukan FGD di masyarakat dengan menghadirkan sekelompok remaja dan ibu-ibu rentang umur 15-49 tahun (wanita usia subur).

III. HASIL

Bonus Demografi menutup

Salah satu indikator untuk mendapatkan informasi terjadinya peluang bonus demografi dengan menghitung angka rasio ketergantungan umur. Rasio ketergantungan umur (RKU) atau *dependency ratio* (DR) yang terendah dibawah 45 persen diasumsikan sebagai puncak bonus demografi.

Adioetomo (2018) merumuskan transisi demografis lanjut merupakan kondisi kependudukan dimana komposisi rasio ketergantungan umur (RKU) 40-45 persen. Mengapa RKU 40-45 persen sebagai transisi demografis lanjut, sebab pada posisi tersebut berada pada area jendela peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi. Proporsi penduduk berusia produktif lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Jendela peluang hanya terjadi satu kali dalam periode masa bonus demografi pertama. Tahap setelah itu, masuk pada fase *aging population*.

Hasil proyeksi penduduk 2015-2045 diketahui rasio ketergantungan umur di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 berada pada ceruk terbawah dengan angka rasio 45 persen, sehingga pada tahun tersebut berada di puncak bonus demografi. Tahun 2030 secara berlahan Provinsi Sulawesi Utara bonus demografi menutup menuju *ageing population*. Di Provinsi Jawa Timur dengan data yang sama diperoleh informasi bahwa tahun 2020 provinsi tersebut berada pada rasio ketergantungan umurnya paling rendah yaitu 43 persen. Secara konsep demografi, ceruk rendah rasionya sebagai puncak bonus demografi (*windows of opportunity*). Tahun 2025 provinsi tersebut berada pada kondisi bonus demografi menutup dan memasuki *ageing population*. Terakhir provinsi Bali, Diketahui hasil perhitungan menunjukkan rasio ketergantungan umur terendah berada pada 42 persen di tahun 2020-2025. Sehingga peluang bonus demografi berada pada rentang waktu tersebut, pada tahun 2035 diperkirakan di provinsi Bali memasuki *ageing population* dengan demikian bonus demografi menutup. Pemaparan ini menunjukkan bahwa saat dilakukan penelitian, provinsi lokus penelitian

sedang menghadapi jendela peluang bonus demografi menuju bonus demografi menutup.

Bonus demografi menutup merupakan peristiwa demografis yang harus diantisipasi agar tidak menjadi beban pembangunan di masa yang akan datang. Perlunya perencanaan strategis yang baik untuk mengoptimalkan potensi penduduk produktif dan mensikapi positif datangnya *ageing population*. Bloom, dkk (2003) menyebutkan kebijakan pemerintah perlu memperhatikan kesehatan publik, keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang mempromosikan fleksibilitas pasar kerja, keterbukaan terhadap perdagangan, dan tabungan masyarakat. Bonus demografi tidak serta merta terjadi jika tidak diiringi oleh kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja dalam jangka panjang.

Potensi Pemahaman Bonus Demografi Di Daerah

Kewajiban pemerintah untuk memperhatikan pembangunan kependudukan diatur dalam Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di tingkat daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat pasal 12 (2) menyebutkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/Kota pada point N terdapat 4 sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan standardisasi dan sertifikasi.

Provinsi mempunyai kewenangan untuk pemetakan perkiraan pengendalian penduduk wilayah setempat. Turunan dari kewenangan tersebut, diatur ruang lingkup kewenangan organisasi pemerintah daerah (OPD) provinsi untuk menyediakan informasi peringatan dini dampak kependudukan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa perlunya pengelolaan data kependudukan dan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah. Sehingga untuk merumuskan kebijakan daerah yang memperhatikan isu bonus demografi adalah penting adanya. Disayangkan sekali jika pemerintah daerah tidak peka dan peduli dengan data kependudukan.

Penelitian di ke-3 provinsi menunjukkan bahwa pemahaman bonus demografi masih terbatas. Di tingkat provinsi, pengetahuan bonus demografi hanya di Bappeda, Dinas pengendalian penduduk dan KB dan mitra perguruan tinggi. Dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, koperasi, tenaga kerja dan kesehatan masih minim informasi. Demikian juga di pemerintah daerah kabupaten, informasi isu bonus demografi polanya sama yaitu bappeda dan OPD KB. Dinas lain belum tersosialisasikan isu bonus demografi dan pemanfaatan peluangnya. selanjutnya akan diuraikan pemahaman pemerintah daerah dalam perencanaan daerah.

Provinsi Sulawesi Utara dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021 menyebutkan wilayahnya sejak tahun 2014 mengalami *windows of opportunity* dan puncak bonus demografi pada tahun 2030. Kutipan tersebut dituangkan di bab 7 dokumen perencanaan daerahnya. Informasi yang ada di dokumen tersebut sepertinya tidak disosialisasikan ke instansi terkait. Sehingga saat dilakukan wawancara ke dinas-dinas hanya Bappeda yang bisa menjelaskan dengan baik. Dinas lainnya sepertinya kurang faham dan peduli dengan informasi bonus demografi. Semisal wawancara ke dinas koperasi, mereka lebih berorientasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakukan tanggal 1 Januari 2016. Dinas kependudukan, catatan sipil dan KB provinsi Sulawesi Utara merasa sebagai institusi baru belum faham bonus demografi. Dinas tersebut masih menjalankan peran utama fokus pada kegiatan dukcapil.

Di kabupaten bolongan mongondaw (Bol-Mong) terkait isu bonus masih terbatas, bahkan bappeda belum tersosialisasi isu bonus demografi. Apalagi dinas-dinas terkait lainnya. Dinas kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi dinas utuh mengurus pengendalian penduduk dan KB. Pemahaman bonus demografi sudah faham namun merasa bahwa bonus demografi masih bersifat orasi-orasi atau pidato saja. Untuk mengalakkan isu bonus demografi, Dinas PPKB menggalang bekerja sama dengan pusat studi kependudukan Universitas Samratulangi fakultas FISIPOL menyusun buku Grand Disain Pembangunan Kependudukan (GDPK) periode 2017-2025. Informasi bonus demografi masih terbatas dan kurang komprehensif. Bab 2 tentang profil Kabupaten Bol-Mong menyebutkan mengacu pada struktur usia penduduk, maka Kabupaten Bol-Mong memiliki peluang besar untuk menyambut datangnya fase *windows of opportunity* yang keberadaanya hanya sekali dan akan memberikan

peluang untuk memperoleh bonus demografi. Lebih lanjut disebutkan “apakah Kabupaten Bol-Mong telah siap untuk memacu peningkatan kualitas SDM penduduk sehingga bonus demografi akan membawa berkah atau rahmat pembangunan, bukan sebaliknya sebagai beban pembangunan bagi masyarakat Bol-Mong. Rasio kertegantungan umur pada tahun 2015 diketahui sebesar 53,8. Kelemahan dalam dokumen tersebut tidak dibuat tren rasio ketergantungan umur sebelum tahun 2015 sampai 2035. Sehingga tidak diketahui kapan puncak jendela peluang atau *windows of opportunity*-nya dan bonus demografi berangsur-angsur menutup menuju *ageing population*.

Pemerintah daerah Jawa Timur belum memasukkan isu bonus demografi dalam dokumen RPJMD periode 2015-2019. Bappeda sebenarnya sudah memahami keberadaan bonus demografi di wilayahnya. Pada kesempatan-kesempatan tertentu dilakukan audiensi ke gubernur untuk menyampaikan isu bonus demografi dan mendapat respon positif. Semisal pertemuan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya didalamnya menyisipkan bonus demografi dikaitkan dengan isu strategis pilkada serentak. Menurut informan saat wawancara menyebutkan bahwa tahun 2017 provinsi jawa timur berada pada puncak bonus demografi. Kondisi yang kurang baik dialami jawa timur yaitu salah satunya IPM dibawah angka nasional.

Di kabupaten Sampang informasi bonus demografi masih kurang. Bappeda belum bisa menjelaskan dengan baik pengertian bonus demografi. Isu bonus demografi belum tersosialisasikan dengan baik di sana. Di antara kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Sampang merupakan daerah tertinggal. IPM kabupaten Sampang termasuk yang rendah. Dinas OPD KB berbentuk dinas pengendalian penduduk, KB dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum mempunyai dokumen GDPK. Sehingga peringatan dini dampak kependudukan belum ada. Permasalahan belum tersusunnya dokumen GDPK salah satunya tidak adanya pegawai yang memahami dan penghitung parameter kependudukan. Dulu pernah ada salah satu pegawai yang ditugaskan belajar dan mengerjakan penyusunan data GDPK. Namun pegawai yang bersangkutan sudah ditugaskan ditempat lainya.

Provinsi Bali lebih dulu memasuki bonus demografi dibandingkan 2 provinsi lainnya. Menurut informan yang berasal dari pusat studi kebijakan kependudukan (PSKK) Universitas Udayana menyebutkan tahun 2005 Bali sudah

masuk bonus demografi. Bali termasuk provinsi yang peduli dengan isu bonus demografi. Dokumen perencanaan daerah sudah mengangkat isu bonus demografi.

Di kabupaten Karangasem kondisi hampir sama dengan Kabupaten Sampang. Daerahnya mempunyai masalah dengan IPM yang rendah. Dinas Pengendalian penduduk dan KB belum mempunyai dokumen DGPK. Sehingga advokasi isu bonus demografi ke bupati maupun DPRD belum bisa dilakukan. Alhasil saat wawancara ke DPRD kab. Karangasem, informan menyatakan belum tahu apa itu bonus demografi.

Ancaman Bonus Demografi Di Daerah

Keberadaan bonus demografi di daerah menghadapi tantangan dan ancaman. Pengetahuan dan substansi bonus demografi belum difahami secara menyeluruh di jajaran pemerintahan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang berdampak kurang optimalnya pemanfaatan bonus demografi yang berangsur-angsur mulai menutup. Penelitian yang dilakukan ke-3 provinsi dan masing-masing 1 kabupaten diperoleh informasi adanya ancaman bonus demografi.

Pertama di Provinsi Sulawesi Utara, sejak diberlakukannya penerbangan langsung 4 provinsi dari China, terjadi mobilisasi penduduk China yang datang melalui bandar udara Sam Ratulangi di Manado baik dalam rangka wisata maupun kepentingan lain. Informan menyampaikan keluhan adanya kegiatan warga asing yang datang untuk berdagang maupun bisnis lainnya. Di Kabupaten Bolongan Mongondow ada proyek besar yaitu pabrik semen. Menurut informan perusahaan itu berasal dari China yang bersifat kontrak karya. Pembangunan perusahaan dan infrastruktur dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan tersebut. Masyarakat sekitar merasa tidak dilibatkan dan berkesempatan bekerja sebagai buruh kasar maupun karyawan. Informan menceritakan bahwa kebanyakan pekerja laki-laki. Sehingga pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak jarang melibatkan perempuan masyarakat sekitar. Kekhawatiran adanya penyebaran HIV-AIDS dirasakan oleh informan dari dinas kesehatan.

Selain itu, ancaman bonus demografi di Provinsi Sulawesi Utara adalah adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pemekaran wilayah membutuhkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang membebani APBD. Kabupaten Bol-Mong termasuk wilayah

yang dimekarkan dari Kota Kotamobago. Gedung pemerintahan masih terbatas dan pegawainya banyak yang belum menetap di kab. Bol-Mong. Sehingga kabupaten ini masih sangat sepi dan pelayanan ke masyarakat belum optimal. Pendapatan asli daerah masih sedikit untuk membiayai keperluan operasional dan pelaksanaan program dinas-dinas masih tergantung pada anggaran pusat dan provinsi. Informan dari Bappeda merasa perlu dilakukan pemekaran dan hasilnya jangka panjang akan lebih baik dibandingkan masih gabung dengan Kota Kotamobago. Saat ini, memang masa untuk berjuang meningkatkan pendapatan asli daerah. Saat ini, kami belum merasa adanya bonus demografi.

Permasalahan sosial yang mengancam bonus demografi di Sulawesi Utara salah satunya perkawinan muda. Informan dari PSKK Unsrat menyebutkan masih ditemukannya kejadian usia kawin dini. Angkatan kerja yang menikah dini akan menjadi beban pembangunan jika fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh peserta FGD di Kabupaten Bol-Mong yang menyatakan masyarakat di sini masih banyak yang putus sekolah ke jenjang lebih tinggi karena menikah dini. Sudah menjadi kebiasaan jika ketahuan ada pasangan muda-mudi kemana-mana berdua cepat dikawinkan.

Aspek pendidikan, ancaman bonus demografi dari aspek pendidikan dirasakan oleh pengelola program pendidikan diantaranya ketersediaan sekolah yang belum memadai, partisipasi sekolah yang belum 100 persen. Selain itu, masih ada lulusan SMP maupun SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun sudah ada SMK namun lulusannya belum tertampung di pasar kerja sebab sedikit perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Informan dari dinas pendidikan Jawa Timur menyatakan 60 persen lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang langsung bekerja ada juga yang menganggur sambil nunggu panggilan kalau ada lowongan.

Terkait lapangan kerja, dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi keahlian angkatan kerja. Disisi lain, pemerintah kabupaten dan provinsi masih mengalami keterbatasan alat peraga diklat dan kapasitas tempat. Kesempatan kerja di tingkat kabupaten seperti Bol-Mong belum banyak berdiri industri-industri. Kesempatan kerja lebih banyak sebagai petani dan nelayan. Belum banyak investor yang membuka usaha di kabupaten tersebut mungkin masih kurangnya akses transportasi dan pangsa pasar yang kurang menarik. Peserta FGD di

Kabupaten Bol-Mong berpendidikan SMK ingin kerja sebagai penjaga toko, tidak tertarik kuliah atau merantau mencari pekerjaan. Kebanyakan peserta FGD menyatakan akses informasi lowongan yang diakses melalui internet di HP.

Kedua di provinsi Jawa Timur, ancaman yang dihadapi pemerintah daerah di masa bonus demografi yaitu masih adanya kemiskinan dan IPM yang masih rendah. Provinsi Jawa Timur secara administrasi terbagi kedalam 29 kabupaten dan 9 kota. Jumlah ini sangat banyak dibanding Jawa Barat Dan Jawa Tengah. Sehingga membutuhkan ekstra koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar daerah. Madura menjadi salah satu wilayah yang sulit lepas dari keterbelakangan. IPM di Madura masih rendah. Kultur masyarakat yang religius peran tokoh agama sangat vital. IPM di Madura rendah disebabkan salah satunya masalah pendidikan. Masyarakat disana lebih suka belajar dipondok dibanding sekolah formal. Sehingga banyak yang lulus pondok tapi tidak punya ijazah. Hal ini yang menyebabkan salah satu IPM rendah karena kontribusi pendidikan yang ditamatkan tidak ada ijahannya.

Informan dari Bappeda Kabupaten Sampang menyampaikan permasalahan pendidikan sulit didongkrak 5-10 tahun kedepan. Hal ini senada dengan informan dari dinas pendidikan. Siapapun kepala daerah terpilih tidak mungkin menaikkan IPM dalam jangka waktu 5 tahun kepemimpinannya. Perlu perubahan nilai sosial masyarakat terkait pendidikan. Hasil FGD dengan remaja dan masyarakat terungkap bahwa pendidikan formal kurang diminati. Masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke pondok. Selain pendidikan, kepulauan Madura juga mempunyai permasalahan usia kawin muda. Informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana menyampaikan permasalahan rendahnya usia kawin muda. Perkawinan muda tidak hanya terjadi di perdesaan tetapi perkotaan juga mengalami hal yang sama. Masih ada diskriminasi gender. Anak laki-laki lebih besar peluangnya untuk menempuh pendidikan tinggi dibandingkan perempuan.

Keluarga muda dengan pendidikan yang rendah lebih banyak yang pergi sebagai TKW ke Timur Tengah. Sedangkan suaminya tinggal dirumah. Sehingga sering terjadi perceraian dikalangan pasangan muda. Hasil FGD dengan muda-mudi diketahui ada lulusan SMK jurusan listrik yang merasa tidak suka dengan keahliannya. Ingin bekerja tidak di bidang kelistrikan. Menurutnya saya tidak cocok dan bisa. Dulu sekolah SMK jurusan listrik disebabkan ikut-

ikutan teman. Akibatnya menganggur dan bingung mencari kerja.

Ketiga di provinsi Bali, Provinsi Bali menyadari beberapa dekade ini angka fertilitasnya rendah dan khawatir terjadi kepunahan penduduk asli Bali. Ancaman yang dirasakan adalah banyaknya mobilisasi penduduk dari luar Bali yang mencari pekerjaan. Bali sebagai tujuan wisata internasional tentu membutuhkan jenis pekerjaan yang kompleks yang harus diakui tidak seluruhnya bisa dipenuhi oleh tenaga kerja asli Bali. Perkembangan dan kemajuan Bali masih terpusat di Ibu kota dan kabupaten/kota penyangga. Bappeda dan Gubernur menyadari adanya kesenjangan antar kabupaten/kota terutama Bali bagian utara. Pertumbuhan ekonomi Bali selatan lebih maju dan tumbuh pesat disebabkan sektor perdagangan pariwisata yang tumbuh dengan baik. Kabupaten Karangasem yang termasuk wilayah Bali utara yang tertinggal pembangunan dan kesejahteraan penduduknya. Pendapatan asli daerah dan sumber daya manusianya masih rendah. Saat dilakukan FGD dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa pemudanya tidak suka merantau untuk keluarga daerah. Mereka lebih suka bekerja seadanya didaerahnya. Hal ini diperparah lagi IPM di Kabupaten Karangasem masih rendah.

Skema Alternatif Model Pemanfaatan Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan rekayasa kependudukan melalui program keluarga berencana dan peningkatan program kesehatan ibu dan anak yang berlangsung sejak 1970an. Intervensi pemerintah yang kuat mampu menekan angka kelahiran dan keamtian bayi sehingga proporsi penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif. Setelah otonomi daerah, intervensi program keluarga berencana mulai surut dan mengubah arah bukan lagi membatasi jumlah anak tapi peningkatan kualitas keluarga.

Hasil wawancara dengan dinas perindustrian, dinas koperasi dan dinas tenaga kerja. Program dan kegiatan di masing-masing dinas belum mengarah pada pemanfaatan bonus demografi. Peran dinas di tingkat provinsi bersifat pembinaan, Sedangkan dinas di tingkat kabupaten bersifat pendampingan dan pencatatan.

Selama ini pembahasan bonus demografi selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan kesehatan dan kemiskinan. Masih jarang yang mengaitkan bonus demografi dengan potensi daerah terutama instansi

pengelola program dan kegiatan seperti dinas koperasi dan UKM, dinas Ketenagakerjaan, dan dinas Perindustrian dan perdagangan. Berikut ini akan digali potensi instansi tersebut.

Pertama, melalui dinas tenaga kerja. Menurut pengamatan peneliti. Masyarakat masih minim informasi dan akses program dinas tenaga kerja. Selam ini dinas tersebut identik dengan pendaftaran kartu kuning buat pencari kerja. Informan dari dinas ketenagakerjaan kabupaten Bo-mong menyebutkan masih sedikit yang mengikuti pelatihan keahlian. Diakui bahwa kendala anggaran dan fasilitas pelatihan yang terbatas menjadi kendala masih sedikit yang diberikan pelatihan. Untuk jenis pelatihan seperti mobil dan mesin berat lainya belum bisa dilayanani. Selama ini masih pelatihan yang itu-itu saja seperti menjahit, las dan bengkel sepeda motor. Tenaga instruktur pelatihan juga masih terbatas. Sehingga beberapa kali dinasnya mengirim peserta pelatihan ke Manado atau minta bantuan instruktur dari kabupaten terdekat.

Teknologi otomotif dan las sebenarnya sudah maju dan berkembang sehingga alat peraga di balai latihan kerja (BLK) dinas tenaga kerjaan kurang mengikuti tuntutan pasar. Hal ini dikeluhkan oleh informan dari dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bol-Mong. Kalau ada peserta yang ingin kursus hal tersebut harus menyesuaikan dengan ketersediaan instruktur dan alat peraga dari balai latihan kerja di provinsi.

Kedua, melalui dinas peridustrian. Industri kecil dan menengah yang dibina oleh dinas perindustrian mengalami pertumbuhan yang baik. Beberapa kabupaten mulai memperbiki pendampingan dan sosialisasi ke calaon IKM maupun yang sudah ada. Aspek legalitas, pemasaran dan permodalan sering menjadi hambatan bagi pengelola IKM. Di Sulawesi Utara pada tahun 2017 terdapat 1.115 IKM menyerap tenaga kerja sebanyak 2.631 orang.

Ketiga melalui dinas koperasi dan UKM. Meskipun gerakan koperasi tidak segenar dulu. Namun dilapangan menunjukkan potensi koperasi dapat menampung banyak tenaga kerja. Tahun 2018 di Jawa Timur tercatat ada 27.280 koperasi aktif dengan memperkerjakan 5.382 manajer dan 59.780 karyawan. UMKM di Jawa Timur juga tumbuh dengan baik. Terdapat 6.533.694 usaha mikro, 261.827 usaha kecil dan 30.410 usaha menengah dengan total tenaga kerja sekitar 11.117.439 orang.

IV. DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pesimistik pemerintah kabupaten terkait bonus demografi. Kondisi pemekaran daerah yang serba terbatas baik infrastruktur maupun anggaran. Menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten yang sedang berjuang paska pemekaran wilayahnya. Muqoyyidin (2015) menyebutkan dampak pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah yang terbatas, dan masalah pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Sedangkan Ratnawati (2010) memandang positif pemekaran sebab pemekaran daerah juga telah membuka lapangan kerja baru bagi calon-calon PNS, pejabat dan politisi di tingkat lokal; memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan minimal kepada warga masyarakat setempat. meskipun dampak positif pemekaran ini menurut masih terlalu kecil bila dibandingkan cost ekonomi, politik dan sosial dari pemekaran daerah.

Sehingga konsentrasi wilayah pemekaran lebih pada pengembangan infrastruktur, belum sepenuhnya menyadari adanya bonus demografi di daerahnya. Informan dari dinas pengendalian penduduk dan KB masih beranggapan bahwa bonus demografi sebagai retorika pusat belum bisa diimplementasikan di daerahnya.

Adanya ancaman lapangan kerja domestik yang disebabkan kebijakan pusat berupa proyek kontrak karya. Ketidakjelasan pengaturan hubungan pusat dan daerah terkait kontrak karya sering menimbulkan masalah dalam penerapan di sektor investasi (Sondakh,2017). Selain itu, MEA juga mengancam masuknya tenaga kerja asing untuk lapangan kerja yang seharusnya bisa dikerjan oleh penduduk produktif kita. Ada hubungan dan peluang yang perlu disiapkan penduduk produktif dalam meraih bonus demografi dalam era masyarakat ekonomi asean (MEA) (Farihah, dkk.2018).

Fenomena generasi milineal juga mempunyai dampak pada motivasi bekerja disektor formal. Ketika dilakukan FGD di provinsi Bali, ada keluhan dari orang tua yang anaknya pilih-pilih kerjaan. Hal ini senada dengan informan dari dinas ketenagakerjaan Kab. Bol-Mong yang menyatakan sekarang mencari peserta pelatihan di bengkel listrik atau otomotif susah. Peserta lebih suka yang pelatihan yang bekerja di hotel atau kantor. Sehingga perlu inovasi dinas ketenagakerjaan untuk

menyiapkan pelatihan yang diminati dan potensial dapat diserap di bursa kerja. Pemerintah daerah terutama balai latihan kerja perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Agar peran dan pemanfaatan pelayanan pelatihan dan sertifikasi dapat dilayani dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Dewi (2018) bahwa pemanfaatan bonus demografi dengan penciptaan tenaga terampil melalui pendidikan non formal juga perlu ditingkatkan melalui pemberian kursus dan pelatihan di Balai Latihan Kerja.

Internet menjadi barang kebutuhan dasar, bukan lagi sekunder atau mewah. Info lowongan kerja sudah dapat dengan mudah diakses di internet melalui HP. Hampir seluruh peserta FDG menyatakan akses internet melalui Handphone. Setiap bulan menyisihkan uang saku untuk membeli paket data. Bonus demografi dapat menjadi kegagalan jika fasilitas yang membuka akses tidak tersedia secara murah dan mudah. Falikhah (2017) mengungkapkan pentingnya akses internet untuk menyongsong bonus demografi. Dengan internet terjadi diversifikasi lapangan kerja. Sebelumnya orang mencari ojek harus di pangkalan atau pos, dengan internet tidak lagi perlu mangkal untuk cari penumpang. Orderan akan datang sendiri melalui aplikasi yang ada di Hp tukang ojek. Demikian juga mencari lowongan tidak lagi beli Koran atau datang ke papan pengumuman lowongan. Melalui hp semua informasi lowongan kerja bisa diakses dengan mudah. Disinilah peran pemerintah daerah bekerjasama dengan operator telekomunikasi untuk membangun sentral-sentral informasi yang bisa menjangkau seluruh pelosok daerah.

Terakhir pemanfaatan pelayanan dinas perindustrian dan dinas koperasi dan UMKM. Selama ini, kedua instansi tersebut belum diangkat sebagai role model pemanfaatan bonus demografi. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan IKM dan UMKM dimasa bonus demografi. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuraeni (2018) bahwa potensi mengembangkan usaha lokal itu penting, warga lokal bisa menjadi supplier atau produsen terhadap perusahaan. Pemerintah bersama-sama masyarakat perlu melakukan pemetaan potensi daerah dan peluang pengembangannya serta strategi produksi, pengolahan dan pemasarannya.

Perlu ada penelitian lanjutan untuk melihat sejauhmana peran kedua dinas tersebut dalam mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja mandiri. Sehingga bonus demografi tidak hanya dipandang hanya penyiapan tenaga kerja terlatih dan tersertifikat untuk bekerja diperusahaan-perusahaan bonafit.

Tapi dari rakyat membangun potensi local untuk optimalkan bonus demografi menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Keuntungan penciptaan lapangan mandiri yaitu keberlangsungan usaha bisa diwariskan ke generasi selanjutnya.

V. KESIMPULAN

1. Bonus demografi secara istilah masih dianggap hal baru yang dan belum dipahami secara benar oleh pemerintah daerah terutama kabupaten. Bonus demografi masih dianggap retorika nasional. Diperkirakan provinsi Sulawesi Utara tahun 2030 bonus demografi akan menutup, di Bali pada tahun 2035 dan di Jawa Timur pada tahun 2025. Apalagi daerah yang mangalami pemekaran wilayah menghadapi tantangan untuk memaksimalkan penduduk produktifnya di masa bonus demografi.
2. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan 5 pilar belum diselesaikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga signal peringatan dini kependudukan terkait bonus demografi tidak berfungsi dengan baik.
3. Potensi program dan kebijakan daerah melalui dinas tenaga kerja, dinas koperasi dan UKM dan dinas perindustrian dapat membuka peluang penyerapan lapangan kerja yang banyak.
4. Masih ada sebagian masyarakat yang menempuh pendidikan non formal dan minim skill sehingga berpotensi menganggur.
5. UKM, IKM dan koperasi yang tumbuh dan meningkat dapat dijadikan modal pemanfaatan bonus demografi melalui penciptaan kerja mandiri.

VI. SARAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan :

1. BKKBN perwakilan perlu memperbaiki pemahaman bonus demografi bagi OPD baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam dokumen RPJMD dan GDPK. Selain itu, perlu sosialisasi bahwa bonus demografi akan menutup jika gagal dimanfaatkan akan mengalami beban ganda pembangunan.
2. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif untuk berperan dalam pemanfaatan bonus demografi dengan cara mempunyai pendidikan formal dan sertifikat keahlian.

3. Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian perlu meningkatkan pelayanan, pendampingan dan penjangkauan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa menyerap tenaga kerja yang optimal.
4. Dinas tenaga kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu menyebarkan akses informasi pelatihan, sertifikasi dan jenis pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi kekinian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmadewi dan Robani Caturseptani sebagai tim penelitian dan pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih.(2018) Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini. Depok:Rajawali pers.
- BPS. (2013). Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: BPS.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Population Matters Monograph MR-1274, RAND, Santa Monica.
- Bongaarts J. 2009 Human population growth and the demographic transition. Phil. Trans. R. Soc.B364,2985–2990.doi:10.1098/rstb.2009.0137.
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugerah Atau Petaka. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 2(3), 17-23
- Fariyah, F., Nurwihastuti, D. W., & Gandamana, A. (2018). Analisis Kesiapan Mahasiswa Kota Medan Sebagai Bagian Dari Bonus Demografi Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 16(31), 10-27.
- Meita Nike Harmanto, dkk.2016. Analisis Pengelompokan Mengenai Perubahan Struktur Kependudukan Dalam Menghadapi Era Bonus Demografi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.Vo.5. No (2).2016. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/1762.
- Muqoyyidin, A. W. (2016). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287-310.
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).
- Noor, Munawar. 2015. Kebijakan Pembangunan Kependudukan Dan Bonus Demografi. Vol 4, No 1. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
- Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penciptaan Peluang Pengembangan UMKM Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Prosiding PKM-CSR, 1, 1559-1572.
- Ratnawati, T. (2010). Satu dasa warsa pemekaran daerah Era reformasi: Kegagalan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 122-235.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh, 2014. Bali Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030: Peluang atau Bencana. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Vol. X No. 1 : 37 – 44, ISSN : 1907-3275, Bali.
- Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Zulham, T dan Basyiran, B .2015. Bonus Demografi Di Kota Banda Aceh: Peluang Dan Tantangan Ketenagakerjaan.